

**ANALISIS PEGARUH PENYEDIAAN AIR BERSIH FASILITAS PEMERINTAH
DAN MOTIVASI MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.**

Balkis Ratu NL Esser^{*)}

***)Dosen FPOK IKIP Mataram**

balqis_esser@yahoo.co.id

ABSTRACT: *Providing clean water is an essential component a huge impact on health, the lives of rural people on low incomes in the district of West Lombok, good for daily necessities, household must meet health requirements, among others, free from germs, and does not contain toxic materials, therefore the water is one of the components to be utilized and developed in a focused, planned, as well as useful and can support life human being. A research development activities aimed to find out how the effect of water supply and motivation of the community, the facility will given by the government for low- income governments in western lombok district. In this thesis use non eksprimental ie with one taking data.Data obtained through non eksprimental method is, the data obtained as follows; of 46 people / respondents there were 37 people (63%), which felt the influence of procurement provision of facilities provided by the government.*

Keywords: *Analysis of the effect of the provision of facilities, clean water infrastructure.*

ABSTRAK : Penyediaan air bersih merupakan komponen penting yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah di kabupaten lombok barat, baik untuk kebutuhan sehari-hari, keperluan rumah tangga yang harus memenuhi syarat kesehatan antara lain, bebas dari kuman penyakit, dan tidak mengandung bahan beracun, oleh karena itu air merupakan salah satu komponen yang harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara terarah, berencana, serta bermanfaat serta dapat menunjang kegiatan pembangunan secara berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyediaan air bersih dan motivasi masyarakat, akan fasilitas yang diberikan pemerintah bagi pemerintah berpenghasilan rendah di kabupaten lombok barat. Dalam tesis ini menggunakan metode non eksprimental yaitu dengan satu kali pengambilan data. Data yang diperoleh melalui metode non eksprimental adalah, diperoleh data sebagai berikut ; dari 46 orang/responden terdapat 37 orang (63%), yang merasakan adanya pengaruh pengadaan penyediaan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Kata kunci : Analisis pengaruh penyediaan fasilitas, sarana prasarana air bersih.

PENDAHULUAN

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok dan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat. Di beberapa tempat di Propinsi Nusa Tenggara Barat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan masalah yang tidak mudah penyelesaiannya. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumber air yang terbatas dan tidak merata serta

kebutuhan biaya dan teknologi pengolahan sebelum air dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluannya. Oleh karena itu, air merupakan salah satu komponen lingkungan hidup yang harus di manfaatkan dan dikembangkan secara terarah, berencana, serta bermanfaat sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan secara berkesinambungan.

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Air

yang digunakan untuk kebutuhan manusia sebagai air minum dan keperluan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, antara lain bebas dari kuman penyakit dan tidak mengandung bahan beracun. Air minum yang memenuhi syarat kesehatan sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perjalanan air melalui beberapa cara dan sarana, hal ini kemungkinan besar mendapat pencemaran fisik, kimia maupun bakteriologi yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia.

Dalam menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat dan untuk kesejahteraan umum maka perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup-khususnya keberadaan sumber mata air yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Perhatian khusus diberikan pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, daerah kumuh, daerah pedesaan dan terpencil.

Proyek air bersih diarahkan untuk meningkatkan pengamanan kualitas air bagi berbagai kebutuhan kehidupan manusia untuk seluruh penduduk, baik yang berada di pedesaan maupun perkotaan. Sarana yang akan dicapai antara lain meningkatkan kualitas air bersih sehingga memenuhi syarat kesehatan dan menurunkannya resiko pencemaran sarana air bersih perpipaan dan non perpipaan, meningkatnya cakupan air bersih untuk daerah pedesaan.

Tujuan proyek WSLIC adalah pembangunan sarana air bersih (SAB) dan peyehatan lingkungan pemukiman (PLP) yang aman, cukup dan mudah serta penyuluhan hygiene dan sanitasi untuk

masyarakat berpenghasilan rendah yang belum menikmati pelayanan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (ABPLP).

Proyek Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Water Supply and Sanitation Project for Low Income Communities) atau biasa disebut sebagai WSLIC, merupakan proyek yang ditujukan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan. Salah satu komponen kegiatan dalam proyek ini adalah pengadaan prasarana dan sarana air bersih. WSLIC adalah Kegiatan Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Water Sanitation for Low Income Communities) merupakan sebuah proyek yang didesain untuk memfasilitasi peningkatan status kesehatan, produktifitas, dan kualitas hidup dari sejumlah komunitas miskin di desa tertinggal. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan layanan kesehatan yang berhubungan dengan penyakit penularan melalui air di lingkungan masyarakat; menyediakan layanan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang aman, murah, memadai, dan mudah didapat; serta mengembangkan kesinambungan dan efektivitas melalui partisipasi masyarakat. Kontribusi digunakan untuk memberi bantuan teknis, kontrak-kontrak pelayanan termasuk penyediaan materi kesehatan bagi sekolah dan masyarakat, serta paket-paket media propinsi dan kabupaten, dan melaksanakan penelitian khusus menyangkut hal-hal seperti penelitian dampak proyek, pelatihan fasilitasi masyarakat tim, dan audit teknis serta penelitian kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan prasarana dan sarana air bersih ini adalah Demand Responsive Approach (DRA), artinya masyarakat secara aktif terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sampai dengan operasi dan pemeliharannya. Masyarakat menentukan sendiri pilihan prasarana dan sarana yang

akan dibangun, sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan mereka. Penyediaan air bersih ini diharapkan dapat mengurangi berbagai penyakit yang disebabkan oleh air yang kurang baik kualitas dan kuantitasnya. Proyek penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah diimplementasikan. Proyek ini tidak semata ditujukan bagi penyediaan air bersih bagi masyarakat melainkan juga untuk mendidik masyarakat setempat mengembangkan manajemen pengelolaan sarana secara profesional guna menjamin kemandirian dan keberlanjutan sarana. Dengan menggunakan meteran air, partisipasi kontribusi pelanggan terhadap sarana lebih mudah diketahui baik oleh pengurus sarana maupun konsumen itu sendiri, sehingga tidak ada keberatan atas pembayaran bulanan yang dibebankan. Seluruh sarana air bersih yang difasilitasi oleh WSLIC dikelola secara langsung oleh masyarakat setempat melalui pengurus yang ditunjuk dari mereka.

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat proyek dirancang dengan pendekatan sebagai berikut : a). Sasaran adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memperoleh pelayanan ABPLP di daerah pedesaan, b). Partisipasi masyarakat, c). Berdasarkan kebutuhan masyarakat yang memerlukan intervensi, d). Pemilihan biaya oleh Masyarakat, e). Pendekatan berdasar pada program dan pengkajian pengalaman, f). Sumberdaya dan peningkatan institusi, g). Memanfaatkan Lembaga Sosial Masyarakat

Berdasarkan pengalaman yang lalu, meskipun pemerintah telah melakukan persiapan masyarakat, namun masih perlu ditingkatkan. Proyek ini memanfaatkan kelembagaan yang ada, potensi ekonomi dan berbagai proses peningkatan kemampuan masyarakat sebagai pertimbangan dalam siklus proyek.

Perencanaan dasar sebagai alat untuk pengelolaan dan pelaksanaan proyek, adalah rencana pembangunan desa. Dalam rencana pembangunan desa, masyarakat dapat memilih berbagai pilihan teknis,

dengan segala resiko yang ditanggung terhadap sarana yang dipilih bersama bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Cakupan air bersih Kabupaten Lombok Barat mencapai 57,74%, dengan kata lain penduduk yang sudah menikmati air bersih (termasuk PDAM) sebanyak 543.586 jiwa. Dari pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh proyek WSLIC sebagai berikut : 15 sampel (12,5%) baik, 2 sampel (1,7 %) kurang baik, 21 sampel (17,5%) jelek, 17 sampel (14,1%) amat jelek dan 65 sampel (54,2%) amat sangat jelek.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Bricee (1972) mengatakan bahwa, pelaksanaan koordinasi tidak saja mengutamakan bersatunya anggota organisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, tetapi juga di dalam penyediaan dan penggunaan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama seperti penggunaan dana, sarana dan tenaga dan tenaga, untuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Uveges (1971) mengatakan bahwa, proses kelompok merupakan suatu proses dimana masing-masing kelompok yang terlibat koordinasi mengadakan-perencanaan awal untuk menyusun tujuan dan hasil yang akan dicapai, kemudian diadakan pertemuan lagi untuk menilai kemajuan yang telah dicapai.

Cuminggs (1981) mengatakan kan bersatunya kelompok dan meningkatnya koordinasi terjadi jika anggota organisasi mengembangkan norma-norma serta saluran komunikasi yang berguna bagi pelaksanaan tugas yang efektif.

Menurut Lawler dkk, (1980) salah satu organisasi adalah memberikan kemudahan bagi perorangan atau kelompok untuk melaksanakan tugas-tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi dengan memberi fungsi yang berbeda-beda dan dengan menciptakan mekanisme koordinasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 6 tahun 1998 koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai

keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna yang sebesar-besarnya.

Tugas tim koordinasi adalah :

1. Menetapkan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pengelolaan bantuan pembangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.
2. Melakukan pengendalian dan monitoring/ bimbingan teknis sarana penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.
4. Menyusun laporan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.

1. Macam-macam Koordinasi

a. Koordinasi Vertikal adalah tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

b. Koordinasi Horizontal terbagi dalam 2 bagian :

1. *Interdisciplinary*, yaitu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan yang lain secara intern, maupun ekstren pada unit-unit yang sama tugasnya.

2. *Interrelative*, yaitu koordinasi antar badan atau instansi. Unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung baik secara intern maupun ekstern yang tingkatnya setaraf.

Stoner dan Wankel (1986) menyebutkan masalah dalam pencapaian koordinasi yang efektif adalah kebutuhan akan koordinasi atas aktivitas organisasi itu

paling kecil pada ketergantungan kelompok, lebih besar pada pada kebergantungan sekuensial dan paling besar kebergantungan timbal balik. Kalau kebutuhan akan koordinasi itu meningkat, maka meningkat pula kesulitan untuk mencapainya secara efektif. Meningkatnya spesialisasi pun memperbesar kebutuhan akan koordinasi. Semakin besar tingkat spesialisasi, akan semakin sulit pula bagi manajer untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai unit yang telah dispesialisasikan.

Koordinasi yang efektif dalam komunikasi. Secara langsung koordinasi itu bergantung pada perolehan, transmisi dan pengolahan informasi. Semakin besar ketidakpastian akan tugas-tugas yang harus dikoordinasikan akan semakin besar kebutuhan informasi. Karena alasan itulah, ada manfaatnya untuk memandang koordinasi sebagai suatu tugas pengolahan informasi yang penting.

Hakikat koordinasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, setiap aparatur pemerintah bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang masing-masing. Tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah selalu menyangkut kegiatan-kegiatan atau tugas lebih dari satu aparatur pemerintah. Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan atau sasaran tersebut perlu dilakukan pendekatan multi fungsional. Kegiatan aparatur pemerintah perlu di padukan, diselaraskan, dan diserasikan untuk mencegah timbulkan tumpang tindang, benturan, kesimpangsiuran dan kekakuan. Oleh karena itu koordinasi antar kegiatan aparatur pemerintah tidak dapat dihindari. Koordinasi pemerintah di daerah menurut Sistem Administrasi Republik Indonesia (1993) Perencanaan pembangunan di daerah dan desa, koordinasi dilaksanakan melalui forum konsultasi sesuai dengan asas perencanaan dari bawah, yaitu terdiri dari :

- a. Tingkat Desa
Mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat desa berupa rapat desa yang dihadiri oleh anggota-anggota BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat, dipimpin oleh kepala desa. Keputusan rapat BPD disampaikan langsung kepada camat setelah disahkan oleh Lembaga musyawarah desa.
- b. Tingkat Kecamatan
Mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan berupa temu karya BPD yang dihadiri oleh para kepala instansi daerah otonom tingkat kecamatan yang mendapat pembinaan dari pejabat Bappeda, kantor bangdes.
- c. Tingkat Kabupaten
Mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten daerah berwujud koordinasi pembangunan daerah yang dihadiri oleh kepala kantor departemen, dinas-dinas daerah, instansi daerah, yang dipimpin oleh kepala bappeda.

2. Pengawasan

Pengawasan pada hakikatnya adalah untuk mengetahui kondisi kegiatan yang sedang dilakukan apakah kegiatan tersebut telah tercapai sasaran yang ditentukan. Apabila terjadi penyimpangan itu, bagaimana tindakan yang diperlukan untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Tujuan pengawasan yang lain adalah untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau tingkat penyelesaian dari kegiatan itu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Selain hal tersebut pengawasan juga berusaha untuk mengetahui dan menghindarkan kemungkinan kesalahan dikemudian hari dan mencari upaya-upaya untuk mengatasinya (Gitosudarmo, 1990).

Fungsi manajerial dari pengawasan/pengendalian adalah untuk mengukur dan mengoreksi prestasi bawahan guna memastikan tujuan organisasi disetiap tingkatan dapat dilaksanakan sesuai dengan

tingkat rencana yang sudah dibuat. Dengan demikian pengawasan harus dilakukan oleh setiap petugas dalam organisasi tersebut dari direktur sampai sampai dengan petugas pengawasan yang terkecil pada unit pelaksanaan (Koontz dan Weihrich, 1990). Siagian menyebutkan pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki berbagai ciri sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan, yang dimaksud ialah teknis pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
- b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya penyimpangan dari rencana.

Pengawasan harus mampu mendeteksi penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan. Usaha deteksi harus dilakukan sedini mungkin dan informasi tentang hasil deteksi itu harus segera sampai pada manajer yang secara fungsional bertanggung jawab agar segera dapat mengambil tindakan.

Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik titik strategik tertentu.

3. Efektifitas

Efektifitas sebagai tercapainya sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam artian bila tujuan yang dicapai sesuai dengan rencana disebut efektif, tetapi jika rencana yang disusun tidak tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan hal ini disebut tidak efektif.

Pengukuran efektifitas merupakan keharusan dalam administrasi pembangunan bila dikaitkan dengan fungsinya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditentukan. Dibandingkan dengan efisiensi, pengukuran efektifitas lebih bisa diandalkan dalam pembangunan, karena efisiensi sifatnya

lebih rutin dan kurang dapat memecahkan masalah, sedangkan efektivitas dianggap lebih sesuai. (Tjokroamidjoyo, 1974)

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh pimpinan guna mencari keselaran, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas dari berbagai satuan yang berada dibawahnya dan instansi terkait pemerintah yang terkait serta badan organisasi lainnya agar tercapai secara efisien dan efektif.

Pengawasan merupakan proses dari seluruh kegiatan guna lebih menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya penyimpangan dari rencana.

Efektivitas sebagai tercapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran efektivitas merupakan keharusan dalam administrasi pembangunan bila dikaitkan dengan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan pendekatan *crosssectional* yaitu dengan melakukan pengukuran atau observasi pada variabel penelitian hanya satu kali pada saat yang sama. Untuk memperkuat jawaban responden dilakukan kroscek pada petugas sanitasi dan stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Data dikumpulkan melalui wawancara kuesioner terstruktur terhadap responden sesuai dengan besar sampel yang ada di wilayah kabupaten Lombok Barat. Dalam kuesioner berisi daftar pertanyaan dan pernyataan yang menyangkut beberapa variabel bebas dan terikat.

Alat yang digunakan untuk penelitian ini berupa kuesioner terstruktur dan berisi pernyataan yang berhubungan dengan

variabel penelitian yang harus dijawab responden.

PEMBAHASAN

Setelah melalui beberapa tahap penelitian dan analisis hasil penelitian, telah membuktikan bahwa faktor-faktor yang terdiri dari fasilitas (X1), motivasi (X2), dan sarana prasarana (X3) mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat (Y).

Factor yang terdiri dari fasilitas (X1), motivasi (X2) dan sarana prasarana (X3), mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Di Kabupaten Lombok Barat. Diantara factor fasilitas (X1), motivasi (X2), dan sarana prasarana (X3) mempunyai pengaruh dominan terhadap kesejahteraan di Kabupaten Lombok Barat (Y) dengan pengaruh dominan 63,3%.

Pihak terkait perlu mengadakan kajian yang mendalam pada peningkatan yang menjadi factor paling dominan terhadap penelitian ini karena sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam melaksanakan pengadaan yang tercermin dari belum menurunnya dan secara signifikan walaupun sudah tersebarnya tenaga fasilitator desa diseluruh desa di kabupaten Lombok barat.

Untuk meningkatkan sarana perlu juga dilakukan pelatihan-pelatihan yang menunjang meningkatnya kesejahteraan baik untuk fasilitator, masyarakat, Dalam tugasnya sebagai fasilitator memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah sebagai pelaksana dalam pengadaandan sebagai seorang manajer dalam koordinasi. Dalam pelaksanaan sebagai pemberi fasilitas, fasilitator harus mampu mengidentifikasi masalah keadaan berdasarkan fasilitas, kelengkapan sarana dan prasarana, dukungan dan kebijakan yang terkait serta mampu dalam menilai factor sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya adalah :

1. Faktor – factor yang terdiri dari motivasi (X1), Sarana dan Prasarana (X2) dan kepuasan (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama – sama) terhadap kesejahteraan di Lingkup Kabupaten
2. Faktor – factor yang terdiri dari motivasi (X1), Sarana dan Prasarana (X2) dan kepuasan (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial yaitu terhadap kesejahteraan di Lingkup Kabupaten Lombok Barat (Y).
3. Diantara factor tersebut diatas, ternyata Kepuasan mempunyai pengaruh dominan terhadap kesejahteraan di Kabupaten Lombok Barat , dengan

pengaruh parsial sebesar 63,3%.

2. Saran

Sebagai masukan dapat diberikan sumbang saran yang dapat diajukan sebagai perbaikan manajemen yang merupakan implikasi dari hasil penelitian antara lain :

1. Guna lebih meningkatkan peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan Kebidanan maka factor – factor yang berkaitan dengan motivasi (X1), sarana dan Prasarana (X2) dan kepuasan (X3), sangat perlu untuk ditingkatka secara berkesinambungan.
2. Pihak manajemen perlu memberikan perhatian khusus dalam hal peningkatan fasilitas sebagai skala prioritas dalam hal meningkatkan kesejahteraan (Y) .
3. Peningkatan jenjang pendidikan sangat diperlukan dalam peningkata kesejahteraan masyarakat dapat dengan signifikan meningkatkan derajat bkesehatan masyarakat.

KEPUSTAKAAN

- Al Gifari. 2000. Analisis Regresi. Teori, Kasus, dan Solusi. BPFE. Yogyakarta.
- Agustono Setiawan, Pusat Kajian Sumber Daya Air, PKSDA, Lembaga Penerbit Fakultas Teknik Universitas Mataram, Mataram 2003
- Direktorat Jendral Penyakit Menular dan Lingkungan 2003, *Central Project Manajement Unit WSLIC-2*, Jakarta
- Departemen Kesehatan RI 2003, Panduan Teknis Pencatatan dan Pelaporan dana Pedoman Bagi Tim Kerja Masyarakat, Jakarta
- Ghozali, Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Maslow, Abraham H. (1993). *Motivasi dan Kepribadian*. Jakarta: PT. Pustaka Binawan Presindo
- Robert M. Monczka, Kenneth J. Petersen, Robert B. Handfield, and Gary L. Ragatz. *Success Factors in Strategic Supplier, Alliances : The Buying Commpany Perspective. Decision Sciences*. Vol. 29 Number 3 Summer 1998.
- Robert, D., Arnott, Does Dividend Policy Foretell Earnings Growth?, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2001.
- Robertson, John (1994), "A Ratio Model to Measure Changes in Financial Health", *Management Accounting*, pp. 55-57.
- Riduwan, 2002, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Cetakan Pertama, Penerbit Alfabeta

Sanroepie, D., 1994, *Penyediaan Air Bersih, Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sanitasi*, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.

Surachmad, 2012, *Hand Out Metode Riset*, Design STIE ABI Surabaya.

Supranto, MA, 2000, *Teknik Sampling, untuk Survey & Eksprimen*, Edisi Baru, Cetakan Ke Tiga, Maret.

Setiawan, Agustono 2003, *Evaluasi Mata Air di Lombok*, Mataram.

Umar Fahmi, Ahmadi 2003, *Proyek Air Bersih dan Sanitasi Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Jakarta